IQRO: *Journal of Islamic Education*
2025, Vol.8, No.2, hal. 464-473
ISSN(E): 2622-3201
2025 PAI IAIN Palopo. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/iqro

Kolaborasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjar: Analisis Kebijakan Pendidikan

[*1]Milawati, [2]Ahmad Suriansyah, [3] Ratna Purwanti
[123]Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Email: milawatispd426@gmail.com

Abstract
The quality of basic education is a primary concern in facing the global challenges of the 21st century. This study analyzes the collaboration between the K3S (School Supervisory Agency) and school supervisors in Banjar Regency in improving education quality. A qualitative case study method was used, with purposively selected principals, supervisors, and policymakers. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The results indicate the existence of regular forums and joint supervision between the K3S and supervisors to discuss school issues, design programs, and evaluate achievements. This collaboration is supported by open communication, a shared vision, and support from the Education Office. However, success still depends on individual initiative. Barriers faced include budget limitations and differing perceptions of roles. To overcome these, increased funding allocation, shared perceptions through joint training, and the use of technology for coordination are needed. This collaboration reflects strategic management practices and communities of practice that are important in the sustainable development of basic education quality. The results of this study are expected to provide policy recommendations to strengthen synergy between related parties.
Keywords: *Basic education; collaboration, school supervisor; K3S; policy*

Abstrak
Mutu pendidikan dasar menjadi perhatian utama dalam menghadapi tantangan global abad 21. Penelitian ini menganalisis kolaborasi K3S dan pengawas sekolah di Kabupaten Banjar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Metode studi kasus kualitatif digunakan dengan subjek kepala sekolah, pengawas, dan pemangku kebijakan yang dipilih purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan adanya forum rutin dan supervisi bersama antara K3S dan pengawas untuk membahas masalah sekolah, merancang program, dan mengevaluasi capaian. Kolaborasi ini didukung komunikasi terbuka, visi bersama, dan dukungan Dinas Pendidikan. Namun, keberhasilan masih bergantung pada inisiatif individu. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan perbedaan persepsi peran. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan alokasi dana, penyamaan persepsi melalui pelatihan bersama, serta pemanfaatan teknologi untuk koordinasi. Kolaborasi ini mencerminkan praktik manajemen strategik dan community of practice yang penting dalam pengembangan mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antar pihak terkait.
Kata kunci: *Pendidikan dasar; kolaborasi, pengawas sekolah; K3S; kebijakan*

©IQRO: *Journal of Islamic Education. This is an open access article under the Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0)*

Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan dasar merupakan prioritas utama dalam kebijakan pendidikan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan abad 21 (Dewi & Suriansyah, 2025; Dewi *et al.*, 2025; Amelia *et al.*, 2025). Pada tingkat daerah, peran kelembagaan seperti Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah sangat strategis untuk menjembatani kebijakan dan praktik di sekolah. Akhmad & Azzam (2022) menyatakan K3S sebagai wadah profesionalisme kepala sekolah, serta pengawas sebagai pemantau mutu pendidikan, seharusnya saling bersinergi dalam menciptakan sistem pembinaan yang efektif. Namun, di banyak daerah, termasuk Kabupaten Banjar, kolaborasi antara keduanya belum berjalan optimal dan cenderung masih bersifat administratif. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya perbaikan mutu pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dasar (Nurafni *et al.,* 2022).

Beberapa studi terdahulu menyoroti pentingnya kolaborasi antar aktor pendidikan dalam mendorong peningkatan mutu sekolah. Penelitian oleh Trisnawati *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sinergi antara pengawas dan K3S mampu meningkatkan efektivitas supervisi kepala sekolah. Begitu pula penelitian Rahmawati (2018) mengungkap bahwa kolaborasi K3S dengan pengawas berdampak pada peningkatan kompetensi guru secara tidak langsung. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum masuk ke ranah analisis kebijakan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya celah untuk meneliti secara lebih dalam dari perspektif kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Kebijakan daerah tentang penguatan peran K3S dan pengawas belum sepenuhnya diimplementasikan secara sinergis dan terukur. Kabupaten Banjar, meskipun terdapat forum-forum rutin seperti rapat K3S dan pembinaan dari pengawas, realisasi program bersama yang konkret masih minim. Banyak kegiatan K3S bersifat formalitas, sedangkan pengawas fokus pada pelaporan, bukan pembinaan profesional yang kolaboratif. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya regulasi teknis yang mengarahkan peran bersama dalam peningkatan mutu pendidikan. Maka dari itu, penting untuk menelusuri bagaimana kebijakan lokal diinterpretasikan oleh para pelaku lapangan (Permendikbud No. 15 Tahun 2018).

Penelitian ini hadir untuk mengaitkan antara kolaborasi kelembagaan (K3S dan pengawas) dengan analisis kebijakan pendidikan di daerah. Tujuan penelitian ini yakni

menganalisis secara mendalam bentuk kolaborasi antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Banjar, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan implikasi kebijakan lokal yang memengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan daerah. Banyak penelitian lebih menekankan pada teknis supervisi atau pelatihan guru, tanpa melihat bagaimana desain kebijakan mendukung atau menghambat kolaborasi tersebut. Penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana kebijakan dikembangkan, diimplementasikan, serta dipersepsi oleh kepala sekolah dan pengawas di Kabupaten Banjar. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi peningkatan mutu yang berbasis kolaborasi aktor pendidikan lokal. Pendekatan ini menjadi relevan seiring dorongan pemerintah untuk memperkuat tata kelola pendidikan berbasis daerah.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kebijakan kolaboratif berbasis konteks lokal**,** yang belum banyak dikaji dalam studi manajemen pendidikan di Indonesia. Fokusnya bukan hanya pada proses kolaborasi, tetapi juga pada bagaimana struktur dan isi kebijakan daerah memengaruhi pola interaksi antar aktor pendidikan. Selain itu, pendekatan studi kasus di Kabupaten Banjar memberi nilai lebih sebagai potret daerah dengan karakteristik rural, yang sering kali luput dari perhatian penelitian kebijakan. Penelitian ini juga menempatkan suara aktor lapangan sebagai pusat analisis, bukan hanya sekadar data administratif. Dengan begitu, hasilnya diharapkan dapat memperkaya wacana reformasi kebijakan pendidikan daerah secara praktis dan kontekstual.

Namun, seperti halnya penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan, penelitian ini memiliki keterbatasan. Hasil penelitian sangat bergantung pada persepsi subjektif narasumber dan konteks lokal yang tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain secara langsung. Selain itu, Basuki (2019) menjelaskan dinamika kolaborasi yang diteliti bisa berubah karena faktor eksternal seperti perubahan kepala sekolah, mutasi pengawas, atau kebijakan nasional yang baru. Penelitian ini juga tidak secara langsung mengukur dampak terhadap capaian akademik siswa, tetapi lebih pada praktik kebijakan dan manajerial. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif atau eksperimen masih sangat diperlukan untuk melengkapi temuan ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam bentuk dan dinamika kolaborasi antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei hingga Juni tahun 2025. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, serta pemangku kebijakan yang berperan aktif dalam perumusan serta implementasi program kolaboratif. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam saat proses observasi berlangsung bulan Juni awal, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan seperti program kerja K3S, laporan supervisi pengawas, serta notulen rapat koordinasi. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola kolaborasi, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam konteks kebijakan pendidikan daerah. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta dilakukan pengecekan keabsahan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil penelitian tentang kolaborasi K3S dan pengawas sekolah di kabupaten Banjar

Tabel 1. Hasil Penelitian Kolaborasi K3S dan Pengawas Sekolah

Aspek yang Diteliti	Temuan Utama	Sumber Data
Bentuk Kolaborasi K3S dan Pengawas	Pertemuan rutin, penyusunan program pembinaan bersama, supervisi terpadu	Wawancara kepala sekolah, pengawas
Implementasi Kebijakan di Lapangan	Masih bervariasi antar kecamatan; tergantung inisiatif dan komunikasi antar aktor pendidikan	Observasi & dokumen K3S
Faktor Pendukung	Komunikasi terbuka, kesamaan visi, dukungan Dinas Pendidikan	Wawancara & studi dokumentasi
Faktor Penghambat	Terbatasnya anggaran, perbedaan persepsi peran, tidak ada regulasi teknis yang jelas	Wawancara pengawas & K3S
Dampak terhadap Mutu Pendidikan	Peningkatan kesadaran mutu oleh guru, penyelarasan program kerja sekolah	Observasi & laporan supervisi

Aspek yang Diteliti	Temuan Utama	Sumber Data
Respons Terhadap Kebijakan	Pengawas dan K3S responsif terhadap kebijakan pusat, namun belum optimal membuat kebijakan dengan berbasis pada kebijakan lokal/kemitraan	Observasi & laporan supervisi

Sumber: K3S & Pengawas Sekolah

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah di Kabupaten Banjar sudah mulai terbangun melalui forum-forum rutin dan program pembinaan bersama. Bentuk kolaborasi yang paling dominan adalah dalam bentuk rapat koordinasi, supervisi gabungan, dan penyusunan program peningkatan mutu guru. Namun, pelaksanaan di lapangan masih sangat bergantung pada inisiatif personal dan belum sepenuhnya berbasis sistem kebijakan daerah. Beberapa faktor pendukung kolaborasi yang ditemukan adalah adanya komunikasi yang baik, semangat kebersamaan, serta dukungan Dinas Pendidikan dalam bentuk fasilitasi kegiatan. Terdapat hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran, belum adanya regulasi teknis yang mengikat, dan perbedaan persepsi peran antara K3S dan pengawas. Kebijakan pusat belum sepenuhnya diturunkan ke dalam bentuk aturan teknis di tingkat daerah. Secara umum, kolaborasi ini memberi dampak positif terhadap peningkatan kesadaran mutu pendidikan, terutama dalam penataan administrasi sekolah, pembinaan guru, dan perencanaan pembelajaran. Namun, masih minimnya pada aspek perumusan kebijakan lokal menjadikan peran K3S dan pengawas belum maksimal sebagai agen perubahan mutu pendidikan. Penelitian ini menegaskan perlunya penyusunan regulasi daerah yang lebih operasional untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga sekolah dan pengawas dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan dasar. Berikut hasil dokumentasi penelitian kolaborasi K3S dan pengawas sekolah

Gambar 1. Kolaborasi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam Penilaian Observasi Kepala Sekolah

Gambar 2. Pertemuan Rutin Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Pengawas Sekolah

Gambar 3. Sosialisasi SPMB 2025 pada K3S

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara K3S dan pengawas sekolah di Kabupaten Banjar terwujud melalui kegiatan rutin seperti pertemuan koordinasi, penyusunan program pembinaan bersama, dan pelaksanaan supervisi akademik terpadu. Kolaborasi ini mencerminkan adanya kesadaran bersama akan pentingnya sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Suriagiri (2022), yang menyatakan bahwa supervisi pendidikan yang efektif harus berbasis kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Bentuk kolaborasi yang

bersifat formal ini menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif antara kepala sekolah dan pengawas. Namun, efektivitasnya masih sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan di tiap kecamatan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kolaboratif masih bervariasi antar wilayah, tergantung pada inisiatif individu dan intensitas komunikasi antar aktor pendidikan. Perbedaan pemahaman mengenai kebijakan menyebabkan kurangnya keseragaman dalam pelaksanaannya. Menurut Miracantika (2025), implementasi kebijakan publik sering menghadapi tantangan apabila tidak disertai dengan mekanisme yang jelas dan sumber daya yang memadai. Hal ini juga diperparah dengan belum adanya peraturan teknis di tingkat daerah yang mengatur pola kolaborasi secara sistematis. Oleh karena itu, implementasi kebijakan kolaboratif antara K3S dan pengawas masih belum optimal di semua satuan wilayah.

Beberapa faktor yang mendukung kolaborasi antara K3S dan pengawas sekolah meliputi komunikasi terbuka, kesamaan visi dalam peningkatan mutu pendidikan, serta dukungan aktif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Komunikasi yang intensif dapat menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat koordinasi antar pemimpin sekolah. Kesamaan visi juga penting untuk menghindari fragmentasi perencanaan program. Seperti disampaikan oleh Arifin & Mu'id (2024); Suryadi *et al.,* (2023) komunikasi efektif adalah fondasi utama dalam kerja tim yang kuat, termasuk dalam konteks kolaborasi institusi pendidikan. Dukungan struktural dari Dinas Pendidikan menjadi motor penggerak utama terlaksananya program-program kolaboratif tersebut.

Kolaborasi ini menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan anggaran operasional, perbedaan persepsi peran antara pengawas dan kepala sekolah, serta ketiadaan regulasi teknis yang jelas. Hambatan tersebut berdampak langsung pada kontinuitas program bersama yang telah dirancang. Menurut Hatala (2023); Eksanti & Sisdianto (2025) menyatakann, ketidakhadiran regulasi operasional dalam kebijakan akan menghambat keberlanjutan dan efektivitas implementasinya. Ketiadaan pedoman teknis menyebabkan

perbedaan interpretasi terhadap tujuan dan bentuk kolaborasi yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah untuk menata regulasi pendukung secara formal.

Secara umum, kolaborasi ini memberi kontribusi positif terhadap mutu pendidikan dasar, terutama dalam peningkatan kesadaran guru terhadap kualitas pembelajaran dan penataan manajemen sekolah. Guru menjadi lebih proaktif dalam mengikuti program pembinaan (Hapsari *et al.,* 2025) yang difasilitasi secara kolaboratif oleh K3S dan pengawas. Sejalan dengan temuan Rahman & Kurniawan (2025); Abdan *et al.* (2024); Agustina & Suriansyah (2021), bahwa peningkatan kapasitas profesional guru sangat bergantung pada dukungan sistemik dari lingkungan sekolah dan pembina. Selain itu, adanya penyelarasan program kerja antarsekolah menjadi nilai tambah dari keberadaan kolaborasi ini. Meskipun begitu, dampak ini belum diikuti oleh perubahan kebijakan struktural yang lebih luas.

Penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan kebijakan lokal yang bersifat operasional dan mengikat, guna memperkuat pola kolaborasi antara K3S dan pengawas sekolah. Perlu adanya regulasi yang menetapkan peran, alur kerja, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam kerangka peningkatan mutu Pendidikan (Sari *et al.,* 2025). Sesuai dengan pandangan Niron *et al.,* (2013) kebijakan pendidikan yang efektif harus dilandasi oleh analisis kontekstual dan disusun secara partisipatif. Rekomendasi ini penting untuk memastikan bahwa kolaborasi tidak hanya bersifat insidental tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen pendidikan dasar yang berkelanjutan. Dengan demikian, mutu pendidikan di Kabupaten Banjar dapat ditingkatkan secara lebih sistematis dan berkesinambungan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan pengawas sekolah di Kabupaten Banjar telah berjalan melalui forum rutin dan supervisi bersama, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena bergantung pada inisiatif perorangan dan minimnya regulasi teknis daerah. Faktor

pendukung seperti komunikasi terbuka, kesamaan visi, dan dukungan Dinas Pendidikan memperkuat kolaborasi, sementara hambatan utama berupa keterbatasan anggaran dan perbedaan persepsi peran dapat diatasi melalui optimalisasi sumber daya, kemitraan dengan sektor swasta via program CSR, serta pelatihan dan sosialisasi bersama untuk menyamakan pemahaman.

Kolaborasi yang ada telah berhasil meningkatkan kesadaran mutu pendidikan dan menyelaraskan program sekolah, namun belum mampu mendorong transformasi kebijakan yang sistemik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lokal yang operasional dan mengikat agar kolaborasi K3S dan pengawas dapat berperan lebih signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan dasar secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh kualitas sinergi antarlembaga dan dukungan kebijakan yang berpijak pada konteks lokal.

Referensi

Abdan, S., Suriansyah, A., Harsono, A. M. B., Prastitasari, H., & Ferdiyansyah, A. (2024). Profesionalisme Guru SD Dalam Meningkatkan Disiplin Siswa Melalui Pendekatan Emosional dan Kognitif. *Journal Educational Research and Development | E-ISSN: 3063-9158*, *1*(2), 166-171. https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.125

Agustina, F., & Suriansyah, A. (2021). Teacher Professionalism Development. *Journal of K6 Education and Management*, *4*(2), 207-216. https://doi.org/10.11594/jk6em.04.02.09

Akhmad, F. A. P., & Azzam, F. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI SD di Kecamatan Tambun Selatan. *Parameter*, *7*(1), 26-40.

Amelia, R., Hazim, M., Yani, M. T., Trihanto, S., & Utama, H. B. (2025). Transformative Policy Model for Digitalising Education: Accelerating Education for Sustainable Development (ESD) in Indonesia. *IJLTER. ORG*, *24*(2), 459-478.

Arifin, B., & Mu'id, A. (2024). Pengembangan kurikulum berbasis keterampilan dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad 21. *DAARUS TSAQOFAH Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin*, *1*(2), 118-128. https://doi.org/10.62740/jppuqg.v1i2.23

Basuki, S. (2019). Transparansi Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani Pada Sekolah Dasar Di Kota Banjarbaru. *Multilateral: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, *18*(2). https://dx.doi.org/10.20527/multilateral.v18i2.7625

DEWI, R. S., & SURIANSYAH, A. (2025). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN: STUDI KUALITATIF PADA SEKOLAH DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN. *ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, *5*(1), 33-43. https://doi.org/10.51878/elementary.v5i1.4158

Dewi, R. S., Nisa, K., Suriansyah, A., & Nazaruddin, N. (2025, March). Excellent School in 4.0 and 5.0 Era through Quality Management Policy and Quality Culture

Perspective. In *2nd International Conference on Environmental Learning Educational Technologies (ICELET 2024)* (pp. 118-128). Atlantis Press.

Eksanti, V. G., & Sisdianto, E. (2025). Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Lokal. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, *2*(1), 196-207. https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.607

Hapsari, C., Maulia, L., Herniyanti, M., & Cinantya, C. (2025). EMPOWERING (PEMBERDAYAAN) GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, *6*(1).

Hatala, R. (2023). Transformasi Digital di Pedesaan: Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *18*(1), 104-125. https://doi.org/10.30598/populisvol18iss1pp104-125

Miracantika, A. A. P. A. (2025). Implementasi Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, *2*(3). https://doi.org/10.61292/shkr.235

Niron, M. D., Budiningsih, C. A., & Pujiriyanto, P. (2013). Rujukan integratif dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, *43*(1), 109788. https://doi.org/10.21831/jk.v43i1.2247

Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, *1*(1), 44-68. https://doi.org/10.24239/jimpi.v1i1.901

Rahman, M. A., & Kurniawan, S. (2025). Evaluasi Kebijakan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Bahasa Indonesia di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Insan Mulia*, *2*(1), 8-18. https://doi.org/10.59923/jiim.v2i1.400

Rahmawati, U. (2018). *Evaluasi Program School For Principal (Spc) Sekolah Guru Indonesia (Sgi) Dompet Dhuafa* (Master's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah).

SARI, H., NOR, T., SURIANSYAH, A., & SULISTYANA, S. (2025). MODEL KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH PENGGERAK MENUJU PENDIDIKAN BERMUTU INTERNASIONAL. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, *5*(1), 9-16. https://doi.org/10.51878/educational.v5i1.4458

Suriagiri, S., Akrim, A., & Norhapizah, N. (2022). The Influence of School Principal Supervision, Motivation, and Work Satisfaction on Teachers' Performance. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, *17*(7), 2523-2537.

Suryadi, I., Pamungkas, R. W. P., Wahyudi, F. S., & Setiawan, T. (2023). Peran kepemimpinan efektif dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, *1*(2).

Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi pemerintah dan swasta dalam program corporate social responsibility (csr) school improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, *3*(2), 115-123. https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.295